

## LAPORAN SINGKAT

### KOMISI I DPR RI

**KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM (LSF), DAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA (BSSN)**

---

Rapat ke : 2 (dua)  
Tahun Sidang : 2019-2020  
Masa Persidangan : I  
Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menhan dan Menkumham)  
Hari, Tanggal : Senin, 19 Agustus 2019  
Pukul : 14.00 WIB  
Sifat Rapat : Terbuka  
Pimpinan Rapat : Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Komisi I DPR RI  
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P. M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1  
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270  
Acara : 1. Penjelasan/keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara  
2. Penyampaian DIM Pemerintah atas RUU tentang PSDN untuk Pertahanan Negara  
Hadir : 1. ... orang dari 51 Anggota Komisi I DPR RI  
2. a. Menhan, Ryamizard Ryacudu;  
b. Menkumham, diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Agus Hariadi;  
beserta jajarannya.

## **I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 14.15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari.

## **II. KESIMPULAN**

1. Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan/keterangan Pemerintah, yang disampaikan oleh Menhan, terkait dengan RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara.
2. Komisi I DPR RI telah menerima Daftar Inventarisir Masalah (DIM) RUU tentang PSDN untuk Pertahanan Negara dari Pemerintah yang akan digunakan dalam pembahasan RUU tentang PSDN untuk Pertahanan Negara bersama-sama dengan Pemerintah.
3. Terkait dengan DIM RUU tentang PSDN untuk Pertahanan Negara yang telah disampaikan oleh Pemerintah, Komisi I DPR RI minta agar Fraksi-Fraksi di Komisi I DPR RI segera menyampaikan DIM Sandingan RUU tentang PSDN untuk Pertahanan Negara.
4. Sebelum melaksanakan pembahasan terhadap RUU tentang PSDN untuk Pertahanan Negara, Komisi I DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Pemerintah dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi/LSM/Ormas untuk mendapatkan masukan mengenai RUU tentang PSDN untuk Pertahanan Negara.
5. Komisi I DPR RI sepakat dengan Pemerintah untuk melaksanakan Raker pada tanggal 22 Agustus 2019 dalam rangka:
  - a. mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap RUU tentang PSDN untuk Pertahanan Negara;
  - b. pembahasan jadwal dan mekanisme pembahasan RUU tentang PSDN untuk Pertahanan Negara; dan

- c. pembahasan Materi DIM RUU tentang PSDN untuk Pertahanan Negara.

### III. **PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 14.47 WIB.

Jakarta, 19 Agustus 2019  
**KETUA RAPAT,**

**Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI**  
A-111